



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAMBI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARTONO
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 880910

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 328.080.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/128 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 328.080.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 212.814.000

1. MOBIL, DAIHATSU Terios F700-TX MT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 124.687.000
2. MOTOR, HONDA V1J2Q32L0 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.850.000
3. MOTOR, HONDA V1J02Q32L1 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 19.550.000
4. MOTOR, HONDA LIK02033L1 A/T (Vario160) Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 23.880.000
5. MOTOR, HONDA M1K030L0 A/T (STYLO 160) Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 28.847.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 98.480.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 50.492.048

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 689.866.048

III. HUTANG Rp. 61.453.933

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 628.412.115



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.